

UDAR RASA

Akal Sehat

OLEH BRE REDANA

Anak-anak terutama dari kalangan berkecukupan yang sehari-hari berbahasa Inggris tidaklah perlu diopsosikan dengan nasib bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun ekspresi jati diri bangsa. Biarlah anak-anak manis itu berbahasa Inggris entah dengan *grammar* yang rapi atau berlepotan, dan membuat bangga orangtua yang tak paham kaidah bahasa. Yang perlu lebih dikhawatirkan, baik pada anak-anak maupun orangtua bahkan, adalah hilangnya *common sense* atau kita sebut secara sederhana akal sehat.

Soal bahasa yang terucap, kalau Anda kenal para ahli semiologi, tidaklah seberapa dibanding aspek komunikasi secara keseluruhan. Bahasa Jawanya *ora sepiroo*. Roland Barthes, yang tulisannya berjudul *The Death of the Author* banyak dikutip orang yang ingin kelihatan pintar, pasti juga akan mengatakan kecilnya persentase linguistik. Dalam keseluruhan komunikasi manusia tersertakan hal-hal lain, seperti simbol, kode, tanda, citra, bahasa tubuh, suara musik, obyek, dan lain-lain berikut asosiasi yang kompleks dari itu semua. Seribu kali ucapan *I love you* dari cewek di Plasa Senayan, barangkali tidak semenyentuh dibanding kata yang terucap sekali seumur hidup dari seorang wanita kepada pasangannya, dalam bahasa Jawa pula: *tresno*. Bayangkanlah, ruang dan waktunya terpadatkan di situ. Dunia berhenti bergerak.

Hanya dengan kekayaan referensi, kemampuan imajinasi, tak kettinggalan kepekaan terhadap jalannya alam Anda bisa memahami tanda-tanda yang subtil semacam itu, yang terdapat pada semua suku bangsa. Satu bahasa asing, yang paling dominan di planet ini sekalipun, tak akan mampu menjadi pemberontuk tunggal dari kekayaan simbol dan makna yang dimiliki oleh setiap bahasa.

Oleh karenanya, tak berlebihan kalau ada yang melihat, krida bahasa ada kaitannya dengan totalitas krida manusia, menangkap pikiran, tubuh, daya—*mind, body, spirit*. Kalau pikiran kusut, bahasa akan kusut. Di profesi yang berhubungan dengan teks dan bahasa, tak kurang banyaknya yang pikirannya kusut. Kalimatnya membungkung dan bikin gegeret.

Dunia digital memberi andil, bagaimana ilusi mengantarkan imajinasi, mimpi mengantarkan akal sehat. Di televisi, orangtua mendorong anak-anaknya untuk jadi penyanyi, penari, pelawak, dan lain-lain pelaku dunia hiburan. Realitas gadungan dunia digital telah membuat ilusi melampaui kenyataan sehari-hari, melampaui kesadaran bahwa sejatinya ada yang tak bisa ditenggalkan dari penjadwalan seseorang, yakni proses.

Seiring pemujuan terhadap percepatan (*quickness*), proses makin tersingkirkan. Kalau bisa kaya dengan segera, mengapa harus bekerja dengan susah payah. Para motivator paling ahli mengkhobarkan bagaimana menjadi kaya dalam waktu cepat, sukses secara mendadak, problem hidup bisa luntur seketika dengan mantra *power point*.

Terpisahnya pikiran dari kenyataan obyektif berarti juga terganggunya keselarasan antara otak dan tubuh. Orang tergopoh-gopoh. Pada hari pertama masuk sekolah beberapa waktu lalu, di sejumlah tempat orangtua berebutan bangku di kelas terlebih dahulu, seperti para calo di gerbang kereta api zaman dulu. Itulah pelajaran budi pekerti pertama untuk anak-anak: saling se-robot.

Sebagitu miskinkan kita sehingga kalau tidak berebutan bakal tak mendapat bagian? Kemiskinan telah bertransformasi menjadi budaya miskin. Dalam hal ini subyeknya tak selalu harus mereka yang hidupnya berkekurangan. Dia bisa menghinggapi siapa saja, termasuk orang-orang kaya yang menderita *post scarcity syndrome*—sindroma berkekurangan. Kondisi budaya miskin atau disebut antropolog *the culture of poverty* inilah yang mengorangi akal sehat.

Anda, anak-anak Anda mau berbahasa Inggris dan gagok berbahasa Indonesia, silakan. Bahkan mau berbahasa dari planet lain, *mongo*. Bagi saya, yang menyebalkan adalah kalau berhadapan dengan orang yang tak punya akal sehat.

SURAT KEPADA REDAKSI



Anda dipersilakan mengirimkan surat pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di *Kompas*. Surat pembaca atau komentar dikirim ke opini@kompas.co.id atau ke Redaksi *Kompas* Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28, Jakarta 10270, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri.

Sulitnya Cari Modal Usaha

Ketika pemerintah menyampaikan komitmennya untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, saya termasuk pihak yang antusias menyambutnya. Namun, apa daya, komitmen tersebut belum dapat dirasakan masyarakat, setidaknya saya.

Saya mengalami sendiri betapa susah mencari modal untuk membuka usaha. Waktu itu saya ingin membuka restoran. Saya mencoba menawarkan proposal ke bank pemerintah dan bank perkreditan rakyat. Kebanyakan bank memberi syarat bahwa usaha harus sudah berjalan selama dua tahun dan harus memberi agunan berupa *fixed asset*. Kemudian saya coba mengajukan proposal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ke beberapa badan usaha milik negara (BUMN). Saya menghubungi via telepon sebelum mengirimkan proposal. Dari beberapa BUMN yang saya hubungi, kebanyakan sudah tidak menyulurkan dana PKBL, ada yang disebabkan banyaknya kredit macet. Ada juga yang telah menerima proposal dan melakukan survei, tetapi belum dapat memberi bantuan disebabkan kebijakan perusahaan.

Setelah mengalami sendiri betapa susah mencari modal usaha, saya jadi tahu mengapa persentase jumlah pengusaha Indonesia sangat sedikit, tidak sampai 1 persen dibandingkan dengan Singapura (8 persen), Tiongkok, dan Jepang (11 persen), bahkan negara di Asia Tenggara berkisar 3-5 persen. Padahal, menurut teori ekonomi yang berkembang, suatu negara berpotensi menjadi negara maju jika mempunyai wirausaha minimal 2 persen. Ini menandakan ketidakseriusan pemerintah dalam mengembangkan industri UKM. Usaha pemerintah menstimulasi industri kecil menengah cuma retorika belaka, pun masih memimpikan mempunyai produk kebanggaan nasional.

AGUNG BUDI ARNANTO
Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat

KOMPAS

TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pemimpin Umum: Jakob Oetama
Wakil Pemimpin Umum: Lilik Oetama, Rikard Bagun
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Budiman Tanurejo
Walid Pemimpin Redaksi: Trias Kuncayono, Ninuk Mardiana Pambydy, James Luhulima
Redaktur Senior: St. Sularso
Redaktur Pelaksana: Mohammad Bakir
Walid Redaktur Pelaksana: Rusdi Amral, Try Harjono
Sekretaris Redaksi: Subur Tjahjono, Mohammad Nasir

PERSONA

ARIEL HERYANTO

IDENTITAS
"ASLI"
ADALAH
FIKSI

FOTO-FOTO: KOMPAS/RIZA FATHONI

Indonesia telah diberkahi, tak hanya oleh kekayaan kemasarakan dan kebudayaan, tetapi juga oleh sejarah panjang perkembangan gagasan yang cemerlang.

OLEH MARIA HARTININGSIH

B erbagai gagasan ini merupakan hasil persaingan sekaligus percampuran berbagai pandangan dari orang-orang berwawasan kosmopolitan yang berupaya menjelajahi bentuk lokal modernitas *hybrid*.

"Sayangnya sejak pertengahan abad lampau, kekayaan budaya ini banyak yang telah dihapus dari sejarah resmi ingatan bersama," ujar Prof Ariel Heryanto (61), peneliti, pengajar pada Jurusan Budaya, Sejarah dan Bahasa, College Asia-Pasifik, The Australian University di Canberra, Australia.

Itulah pesan utama bukunya, *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia* (KPG, 2015), hasil terjemahan kritikus film Eric Sasono dari buku *Identity and Pleasure: The Politics of Indonesia Screen Culture* (NUS Press, 2014).

Ariel ditemui seusai peluncuran bukunya di Jakarta, awal Juli 2015.

Merongrong ideologi

Menurut Ariel, warisan budaya itu telah menjadi sasaran serangan kelompok modernis yang bersaing dan berupaya memaksakan batasan sempit tentang makna menjadi Indonesia. Untungnya, serangan terhadap kekayaan sejarah dan keragaman Indonesia tidak pernah penuhnya berhasil.

Apa yang ingin ditunjukkan buku itu?

Betapa kaya dan hebat Indonesia krama kemajemukannya. Masalah serius terjadi, ketika ada sebagian aliran modernis tak hanya memuliakan kemurnian-keaslian, tetapi juga merendahkan, memusuhi, dan menyerang yang dianggap kurang, tidak asli atau murni. Secara garis besar, modernisme punya kecenderungan tidak toleran pada yang *hybrid*.

Sikap intoleran ini ditunjukkan oleh sebagian aliran agama dan ideologi yang modernis.

Bagaimana dengan kekuatan dominan yang menindas atas nama apa pun?

Semata-mata menjadi *hybrid* dan menyadari hal itu tak akan mampu menghapuskan ketimpangan sosial, tetapi hibriditas punya daya tarik dalam masyarakat modern terakhir karena berbanyak menjadi alat perlawanan.

Banyak penindasan besar-besaran di dasarkan pada suatu fiks tentang identitas yang otentik, asli, atau murni. Dalam masyarakat kolonial Belanda, ada fiks tentang ke-Eropa-an yang dianggap sama dengan peradaban tinggi dan modernitas.

Fiks ini dijadikan dasar membenarkan ketimpangan dan penindasan kolonial, tidak hanya berdasarkan warna kulit atau keturunan, tetapi juga pendidikan dan gaya hidup ke-Eropa-an.

Di masa dekolonialisasi, orang mengejakan diskriminasi sosial dan berbagai kekerasan politik, berdasarkan siapa yang lebih atau paling "nasionalis". Tahap selanjutnya, dipersempit menjadi etno-nasionalisme, yakni ke-pribumi-an yang dianggap paling atau lebih nasionalis sejati atau murni. Di zaman Orde Baru, diskriminasi itu masih ditambah politik superioritas maskulin, premanisme dan militerisme.

Dalam berbagai masyarakat, yang digunakan sebagai pembenar ketimpangan sosial dan penindasan adalah kemurnian dan keabsahan beragama, beda jenis kelamin dan orientasi seksual, bahasa, warna kulit, kebangsawanahan, pendidikan, modal material, dan seterusnya. Kesa-deraan akan hibriditas membantu me-

PROF ARIEL HERYANTO

◆ **Pekerjaan:** Pengajar dan peneliti pada Jurusan Budaya, Sejarah dan Bahasa, College Asia-Pasifik, The Australian University (ANU) di Canberra, Australia, sejak tahun 2009, University of Melbourne (2000-2008), The National University of Singapore (1996-1999).

◆ **Pendidikan:** PhD Antropologi Budaya, Monash University (1994), MA Kajian Asia, University of Michigan, AS (1984), Sarjana Pendidikan UKSW (1980).

◆ **Cakupan penelitian dan mengajar:** kajian budaya, budaya pop, media massa, politik identitas, kelas menengah perkotaan, analisis wacana, kekerasan politik.

◆ **Karya:** sembilan buku, di antaranya, *Popular Culture in Indonesia: Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics* (2008), *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging* (2006), 600+ artikel di media dan majalah di Indonesia, Hongkong, dan Thailand, bab-bab dalam 45 buku, 29 tulisan di jurnal di Indonesia dan luar negeri, pembicara dan pembicara utama dalam 47 konferensi internasional sejak tahun 1997.

rongrong omong kosong tentang identitas otentik.

Identitas banyak dibahas, tetapi kenikmatan dianggap "non-issue"...

Tak semua orang berpolitik itu selalu bersikap serius. Sebaliknya, yang tampak main-main bisa punya kekuatan politis yang hebat. Antara politik mati-matian, fanatik, idealisme, ideologi, identitas, maupun yang main-main, yang nikmat-nikmat, sering kali tak terpisah. Mereka tercampur. Campurannya tak satu ragam.

Kenikmatan tak pernah alami. Ia harus dipelajari. Misalnya kenikmatan yang dipromosikan dalam film-film yang saya teliti. Di situ cari jodoh, sekolah tinggi di luar negeri dianggap penting, tanpa kepedulian pada masalah sosial yang lebih makro. Kok film seperti itu bisa laris dan terus diproduksi di masa ini dan tidak di masalah.

Mengapa?

Kembali lagi, maaf, ke tahun 1960-an.

Apa kaitan Tragedi 1965 dengan identitas?

Pembunuhan tahun 1965-1966 merupakan dasar paling menentukan dari seluruh identitas dan definisi apa pun tentang Indonesia, sampai sekarang. Dia bukan satu-satunya penyebab, tetapi induk dari berbagai penyebab lain, yang menjelaskan macam-macam, termasuk keuangan kita, tata-sosial kita, akademik kita, agama kita, moralitas kita, penjara kita.

Merumus ulang

Pertanyaan paling penting—dari buku yang ditulis berdasarkan kegiatan penelitian antara tahun 2009 dan 2012—adalah bagaimana orang Indonesia menoba merumus ulang identitasnya se-sudah Orde Baru.

Identitas dan Kenikmatan meneropong sejumlah isi mutakhir dalam masyarakat, mulai dari islamisasi, budaya kaum muda perkotaan hingga K-Pop, politik jalinan, representasi pembunuhan 1965-1966, minoritas Tionghoa, dan menunjukkan keberautan antar berbagai isu tersebut.

Semua itu, menurut pakar Kajian Budaya Universitas Gajah Mada, Dr Budiawani, dalam *endorsement* pada buku itu, bermula pada problematisasi nasional-nasional besar, seperti *nasiona* dan nasionalisme, globalisme dan globalisasi, modernisme dan modernitas, yang selama ini diterima begitu saja.

"Selama ini yang lebih banyak diteliti adalah kaum elite, atau sebaliknya, korban tragedi dan mereka yang dipinggirkan. Orang-orang biasa, hal-hal biasa, jarang diperhatikan peneliti, dan mereka tak tahu bagaimana meneliti orang-orang ini."

Bisa dijelaskan lebih jauh?

Di Indonesia, pernah ada upaya terlembaga, berlingkup nasional, dilakukan

oleh Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat, organisasi kebudayaan kiri) yang mencoba merumuskan teori dan praktik progresif dalam kaitan antara politik dan budaya.

Jadi sejak 1965, tidak ada satu pun disiplin

ilmu yang siap menjelaskan secara komprehensif bagaimana persisnya kebudayaan berkaitan dengan berkelindan dengan politik.

Teori-teori kebudayaan terpisah dari politik. Teori-teori politik terpisah dari kebudayaan. Sementara di masyarakat terjadi gejala luar biasa di bidang politik kebudayaan dan budaya yang politis. Ada fenomena Rendra, Iwan Fals, kemudian Inul. Kajian Budaya atau *Cultural Studies* mengisi kekosongan ini.

Kajian Budaya meneliti hal-hal sepele,

sehari-hari, orang biasa, berbeda dengan teori-teori besar seperti sosialisme yang dulu dijalankan Lekra dan meromantisasi rakyat yang paling tertindas. Kajian Budaya mencoba menata teori dan konsep yang rumit antara kekuasaan dan kebudayaan di kalangan kaum bersahaja dalam kehidupan sehari-hari, bukan kaum elite dan bukan proletariat yang paling menderita.

Yang pertama dan utama waktu itu adalah otoritarianisme dan militerisme, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, di jalan, di dapur, ruang tamu. Juga

memerlukan waktu yang cukup lama.

Di Barat yang dilawan jelas, misalnya kapitalisme dan neo-liberalisme. Di Indonesia?

Indonesia, kalau mau maju, harus sekalipun melihat ke belakang. Ada beberapa kunci persoalan yang tersumbuinya atau tercecer di situ. Secara global juga sangat menarik karena sebagian besar pemikiran besar di bidang musik, akademik-teori, perubahan tata kota terjadi pada awal abad ke-20 itu. Saya meneliti dua kelompok sosial dalam kurun itu: Indo-Eropa dan peranakan Chinese.

Mengapa tidak pernah kuat di Indonesia?

Pertama, lembaga formal di negeri ini begitu lemah. Yang kuat adalah birokratisasi, administrasi, dan formalitas dalam lembaga akademik. Mereka yang cerdas berbakat, dan tekun dalam dunia ilmu pengetahuan tidak menemukan tempat mereka.

Anda tertarik pada sejarah Indonesia 1920-1940 dalam penelitian yang sedang Anda kerjakan. Ada kaitan dengan identitas?

Indonesia, kalau mau maju, harus sekalipun melihat ke belakang. Ada beberapa kunci persoalan yang tersumbuinya atau tercecer di situ. Secara global juga sangat menarik karena sebagian besar pemikiran besar di bidang musik, akademik-teori, perubahan tata kota terjadi pada awal abad ke-20 itu. Saya meneliti dua kelompok sosial dalam kurun itu: Indo-Eropa dan peranakan Chinese.

LINTASAN

Kepak yang Kuat

Ariel Heryanto tumbuh dengan beban indoctrinasi Orde Bar